

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan sering di sandarkan pada kondisi kehidupan yang serba ketidakcukupan, baik dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang dialami setiap negara. Baik negara maju ataupun negara berkembang, kemiskinan merupakan kajian yang selalu di pertimbangkan dan tentunya juga harus di upayakan pengentasannya (Manshor *et al.*, 2020).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki penduduk miskin yang menempati posisi cukup krusial, di lingkup *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) negara Laos menempati posisi pertama dengan jumlah penduduk miskin terbesar, kemudian Indonesia menempati posisi kedua tertinggi dengan jumlah penduduk miskinnya (World Bank, 2025). Karena itu, pemerintah tentu tidak boleh tinggal diam dan harus terus berupaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan baik melalui program pengentasan kemiskinan struktural maupun kebijakan lainnya, selain faktor struktural seperti ketimpangan akses pendidikan, lapangan kerja dan infrastruktur (Simanjuntak, 2025). Kemiskinan yang di akibatkan dampak bencana alam juga menjadi faktor penting yang memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Bencana banjir yang telah terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah memperburuk kondisi ekonomi dan masyarakatnya juga, dampak bencana tersebut berpotensi menggerus fondasi ekonomi rumah tangga melalui kerusakan terhadap aset-aset

produktif seperti: lahan atau tanah produktif, bangunan, peralatan dan mesin, modal usaha serta penurunan tingkat pendapatan masyarakat. Kondisi tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin dan memperpanjang siklus kemiskinan pada keluarga yang terdampak, studi empiris menunjukkan bahwa kejadian bencana alam secara signifikan dapat meningkatkan kerentanan rumah tangga terhadap kemiskinan dan dapat memperlambat proses pemulihan ekonomi di tingkat lokal (Muhammad & Qibthiyyah, 2025).

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama yang muncul sebagai konsekuensi dari ketidakseimbangan perekonomian yang hingga saat ini masih menjadi fokus utama dalam agenda kebijakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kemiskinan sering dijadikan sebagai indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, karena mampu menggambarkan sejauh mana pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pembangunan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2025).

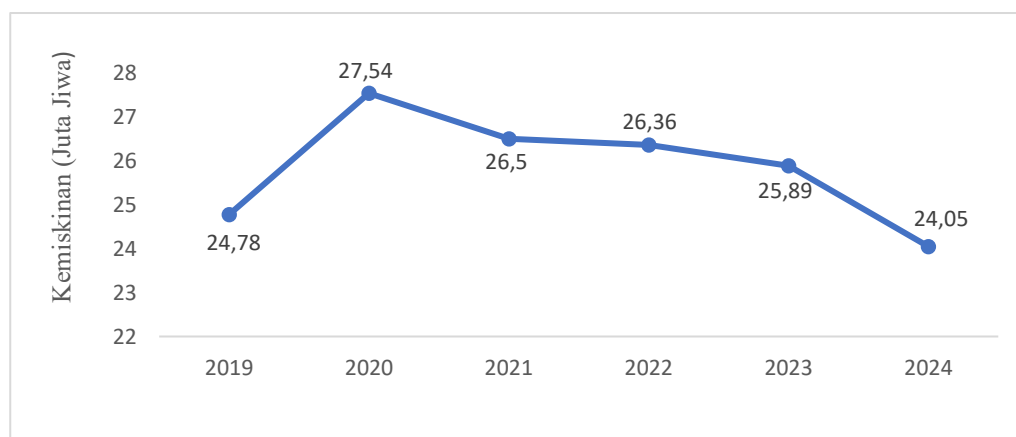
Kemiskinan di Indonesia menempati posisi yang cukup krusial dalam agenda pembangunan nasional karena jumlah penduduk miskin masih relatif besar, meskipun dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada Maret 2025 persentase penduduk miskin di Indonesia berada pada kisaran 8,47 persen atau setara dengan sekitar 23,85 juta jiwa. Capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan periode sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa

berbagai kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan mulai memberikan dampak positif (Badan Pusat Statistik, 2025).

Penurunan kemiskinan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi kesejahteraan yang stabil dan berkelanjutan. Kemiskinan masih menjadi permasalahan prioritas karena sebagian besar penduduk miskin berada pada kelompok rentan, yaitu kelompok masyarakat yang sangat mudah terdampak oleh berbagai guncangan ekonomi. Perlambatan ekonomi global, krisis kesehatan seperti pandemi, serta fluktuasi harga kebutuhan pokok dan energi berpotensi mendorong kembali kelompok rentan tersebut ke dalam kondisi kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia bersifat dinamis dan sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi makro maupun faktor eksternal lainnya (Badan Pusat Statistik, 2025).

Lebih lanjut, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penurunan angka kemiskinan secara kuantitatif belum sepenuhnya menjamin terjadinya peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin secara substantif. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya perlu difokuskan pada penurunan persentase penduduk miskin, tetapi juga pada penguatan ketahanan ekonomi rumah tangga miskin dan rentan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, serta sumber-sumber pendapatan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan menjadi sangat penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan inklusif (Todaro & Smith, 2020).

Untuk melihat kondisi kemiskinan di Indonesia secara lebih jelas, diperlukan analisis terhadap perkembangan jumlah penduduk miskin dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Selain itu, perubahan jumlah penduduk miskin juga dapat mencerminkan pengaruh berbagai kondisi ekonomi, seperti perlambatan ekonomi, pandemi, inflasi, maupun pemulihan ekonomi nasional. Adapun perkembangan jumlah penduduk miskin di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2019-2024

Sumber: *Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025*

Berdasarkan Gambar 1.1 kemiskinan di Indonesia menunjukkan pada periode 2019-2024 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, terlihat bahwa tingkat kemiskinan mengalami perubahan yang cukup nyata dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 24,78 juta jiwa, yang menggambarkan kondisi ekonomi yang masih relatif stabil sebelum terjadinya krisis global. Namun pada tahun 2020 angka kemiskinan

meningkat cukup tajam hingga mencapai 27,54 juta jiwa. Kenaikan ini berkaitan erat dengan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor menurun. Banyak masyarakat mengalami penurunan pendapatan bahkan kehilangan pekerjaan, terutama mereka yang bekerja di sektor informal dan kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah.

Selanjutnya, pada periode 2021 hingga 2024 angka kemiskinan mulai memperlihatkan kecenderungan menurun secara bertahap. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 26,5 juta jiwa, kemudian sedikit menurun menjadi 26,36 juta jiwa pada tahun 2022, dan kembali berkurang menjadi 25,89 juta jiwa pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian mulai berangsur pulih setelah tekanan pandemi. Pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin kembali turun menjadi 24,05 juta jiwa, yang menandakan bahwa kondisi ekonomi masyarakat semakin membaik. Penurunan tersebut tidak terlepas dari meningkatnya kembali kegiatan ekonomi, mulai terbukanya peluang kerja, serta adanya berbagai program bantuan dan perlindungan sosial dari pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka.

Isu kemiskinan yang berkaitan dengan UMKM di Indonesia masih menjadi perhatian penting karena UMKM memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, berbagai permasalahan seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya produktivitas akibat keterbatasan teknologi dan keterampilan, serta sempitnya akses pasar menyebabkan banyak UMKM sulit berkembang. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya pendapatan pelaku usaha dan tenaga kerja yang

terlibat di dalamnya, sehingga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup juga menjadi terbatas (Nasution, 2025).

Akibatnya, UMKM belum mampu berperan secara optimal dalam menekan angka kemiskinan. Selain itu, banyak UMKM masih bersifat informal sehingga sulit memperoleh akses pembiayaan, perlindungan hukum, dan dukungan pemerintah, yang membuat usaha mereka rentan terhadap guncangan ekonomi. Padahal, apabila UMKM berkembang dengan baik, sektor ini dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, memperluas distribusi pendapatan, dan mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. Dengan demikian, lemahnya perkembangan UMKM memiliki keterkaitan langsung terhadap tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia (Nasution, 2025).

Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. UMKM merupakan sektor yang mendominasi struktur perekonomian nasional dan memiliki kontribusi yang besar terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) serta penyerapan tenaga kerja, khususnya bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan berpendidikan menengah ke bawah. Karakteristik UMKM yang relatif fleksibel, padat karya, dan tersebar di berbagai wilayah menjadikannya sebagai sarana penting dalam menyediakan lapangan kerja alternatif, terutama di daerah pedesaan dan wilayah dengan keterbatasan kesempatan kerja formal (Yohanes *et al.*, 2022).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam upaya menekan angka kemiskinan dan

pengangguran di Indonesia. Berdasarkan berbagai data statistik, UMKM merupakan kelompok usaha dengan jumlah paling besar dibandingkan jenis usaha lainnya. Keberadaan UMKM menjadi bagian penting dalam kegiatan ekonomi nasional serta berperan sebagai penggerak perekonomian masyarakat, terutama setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi. Sektor ini terbukti mampu bertahan dan tetap berkontribusi dalam menjaga stabilitas perekonomian.

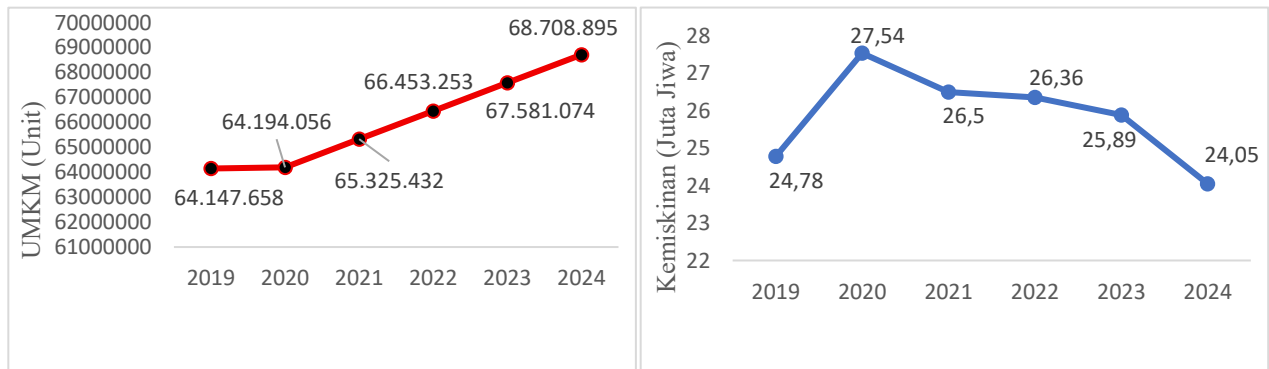
Selain itu, UMKM juga memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Di tengah terbatasnya kesempatan kerja pada sektor formal, UMKM menjadi alternatif yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Oleh karena itu, sektor ini perlu mendapatkan dukungan dan perhatian yang lebih dari pemerintah agar dapat terus berkembang dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Keberhasilan perkembangan UMKM tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat mendorong kemandirian masyarakat serta meningkatkan kreativitas para pelaku usaha dalam mengembangkan ide dan inovasi untuk memperluas usaha mereka (Diwayana, 2023).

Keberadaan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai sumber mata pencaharian bagi pelaku usaha, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian lokal. Melalui aktivitas produksi dan distribusi yang dilakukan, UMKM dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga, mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal, serta memperkuat daya beli masyarakat. Kondisi tersebut berimplikasi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan, karena masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk

memperoleh pendapatan yang stabil dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, UMKM berperan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Sejumlah penelitian empiris mendukung pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa perkembangan UMKM memiliki hubungan yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Juliansyah *et al* (2024), menemukan bahwa peningkatan jumlah dan aktivitas UMKM berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional serta berpotensi menurunkan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan sektor UMKM, baik melalui dukungan permodalan, peningkatan kapasitas usaha, maupun akses pasar, merupakan salah satu strategi efektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Dalam upaya menekan tingkat kemiskinan, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional. UMKM tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghasilan masyarakat, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada kelompok masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu, perkembangan jumlah UMKM menjadi salah satu indikator penting dalam melihat kemampuan sektor produktif dalam mendukung penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Adapun perkembangan jumlah UMKM dan jumlah penduduk miskin di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 1. 2 Jumlah Unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2019-2024

Sumber: *Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025*

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas perkembangan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta jumlah penduduk miskin di Indonesia pada periode 2019-2024, terlihat adanya dinamika yang cukup menarik dalam kondisi perekonomian nasional. Grafik 1.2 di atas menunjukkan bahwa jumlah UMKM mengalami peningkatan secara bertahap setiap tahunnya, yaitu dari sekitar 64.147.658 juta unit pada tahun 2019 menjadi sekitar 68.708.895 juta unit pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa sektor UMKM terus berkembang dan memiliki peran penting dalam mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Banyak masyarakat yang memanfaatkan UMKM sebagai alternatif sumber penghasilan, terutama ketika kesempatan kerja di sektor formal masih terbatas.

Sementara itu, grafik kemiskinan menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin sempat meningkat pada tahun 2020 hingga mencapai 27,54 juta jiwa, kemudian mengalami penurunan secara bertahap hingga menjadi 24,05 juta jiwa pada tahun 2024. Peningkatan kemiskinan pada tahun 2020 terjadi karena melemahnya aktivitas ekonomi selama pandemi COVID-19, yang berdampak

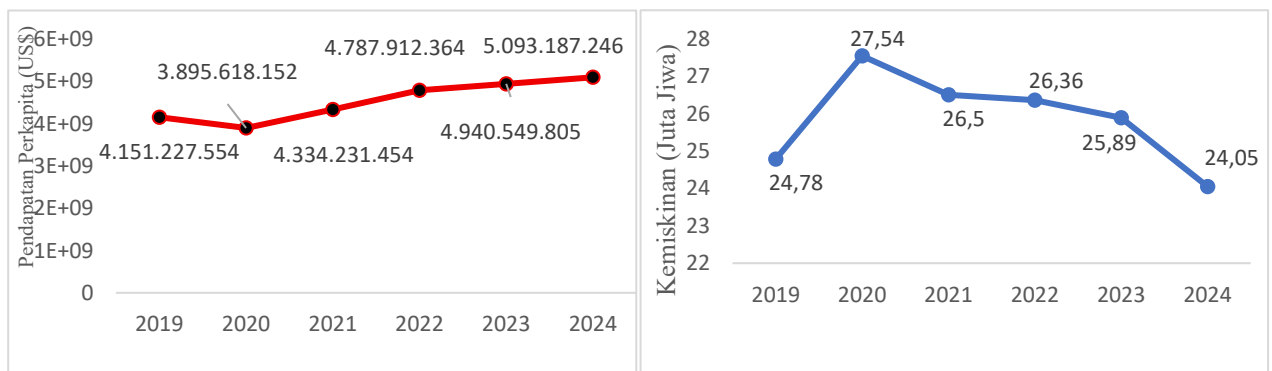
pada berkurangnya lapangan pekerjaan dan menurunnya pendapatan masyarakat. Namun setelah memasuki tahun 2021, kondisi ekonomi mulai membaik sehingga angka kemiskinan perlahan menurun. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan sektor UMKM dapat menjadi salah satu faktor yang membantu pemulihan ekonomi masyarakat serta berkontribusi dalam menekan tingkat kemiskinan.

Kemiskinan juga dipengaruhi oleh pendapatan perkapita, meskipun terjadi peningkatan secara umum, ketimpangan distribusi pendapatan menyebabkan manfaatnya tidak merata. Rendahnya pendapatan berdampak pada lemahnya daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Ketergantungan pada sektor informal dengan upah rendah, serta pengaruh inflasi dan ketimpangan wilayah, semakin memperparah kondisi kemiskinan (Darma, *et al.*, 2022).

Selain itu, peningkatan pendapatan perkapita juga berkaitan erat dengan penurunan tingkat kemiskinan. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan juga ikut meningkat. Kondisi ini dapat membantu mengurangi jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, pendapatan perkapita sering dijadikan sebagai salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Darma *et al.*, 2022). Sejumlah penelitian empiris mendukung pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa pendapatan perkapita memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, semakin tinggi pendapatan perkapita suatu wilayah, maka

semakin rendah persentase penduduk miskin yang ada di wilayah tersebut (Yoseb *et al.*, 2024).

Selain perkembangan sektor UMKM, tingkat pendapatan perkapita juga menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kondisi kesejahteraan masyarakat. Pendapatan perkapita mencerminkan rata-rata kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat, maka semakin besar pula kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar sehingga tingkat kemiskinan cenderung menurun. Oleh karena itu, perkembangan pendapatan perkapita perlu dianalisis untuk melihat keterkaitannya terhadap perubahan tingkat kemiskinan di Indonesia. Adapun perkembangan pendapatan perkapita dan jumlah penduduk miskin di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut. Adapun perkembangan Pendapatan perkapita di Indonesia antara lain sebagai berikut:



Gambar 1. 3 Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2019-2024

Sumber: *world bank*, 2025

Berdasarkan Gambar 1.3 data yang disajikan pada grafik di atas pada periode 2019-2024, terlihat bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang berlawanan. Pada tahun 2019, pendapatan perkapita tercatat sekitar

4.151.227.554 miliar USD, sementara jumlah penduduk miskin mencapai 24,78 juta jiwa. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan pendapatan perkapita menjadi sekitar 3.895.618.152 miliar USD, yang diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk miskin hingga 27,54 juta jiwa. Kondisi ini menunjukkan adanya dampak dari krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan menurunnya aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat sehingga berdampak pada meningkatnya tingkat kemiskinan.

Selanjutnya, pada periode 2021 hingga 2024 pendapatan perkapita mulai mengalami peningkatan secara bertahap hingga mencapai sekitar 5.093.187.246 miliar USD pada tahun 2024. Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin juga menunjukkan tren penurunan hingga mencapai 24,05 juta jiwa. Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat dapat berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan, karena semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat maka semakin besar pula kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehingga jumlah penduduk miskin dapat berkurang (Abdillah *et al.*, 2026).

Selain itu, tingkat pendidikan memiliki hubungan erat dengan kemiskinan. Keterbatasan akses pendidikan berkualitas dan tingginya angka putus sekolah menyebabkan rendahnya keterampilan tenaga kerja. Kesenjangan kualitas pendidikan dan ketidaksesuaian dengan kebutuhan pasar kerja juga mengakibatkan rendahnya pendapatan atau pengangguran. Hal ini pada akhirnya membentuk siklus kemiskinan yang berulang antar generasi (Wulansari *et al.*, 2023).

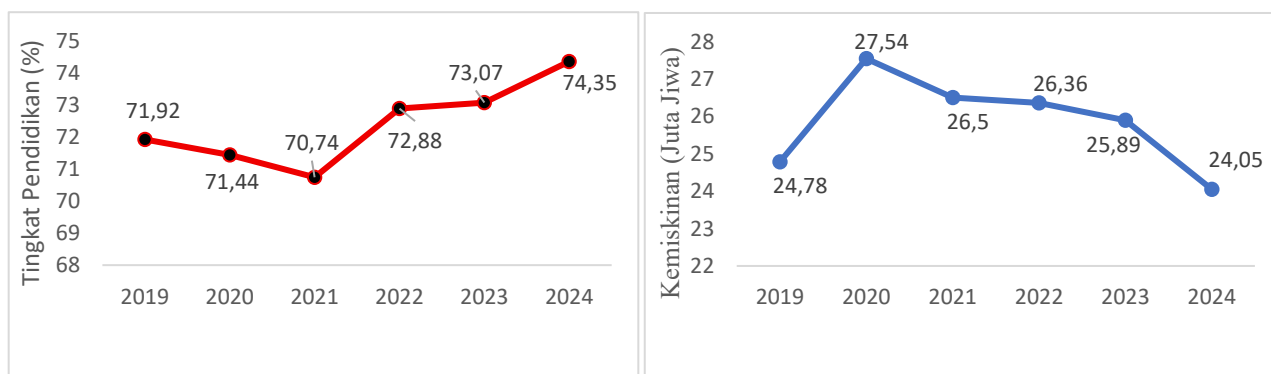
Dari sudut pandang sosial, tingkat pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kemiskinan suatu masyarakat. Pendidikan yang lebih tinggi berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan adaptasi tenaga kerja terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja. Dengan tingkat pendidikan yang lebih baik, individu memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kondisi kesejahteraan rumah tangga.

Selain itu, pendidikan juga berperan dalam memperluas akses masyarakat terhadap informasi, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan, serta mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, di mana peningkatan pendidikan dan IPM cenderung diikuti oleh penurunan persentase penduduk miskin (Darmawan & Ichsan, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa investasi di bidang pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan strategi jangka panjang yang efektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Temuan tersebut menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, seperti pendapatan dan kesempatan kerja, tetapi juga oleh faktor sosial yang saling berkaitan, khususnya kualitas pendidikan dan pembangunan manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan

pembangunan yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan perlu mengintegrasikan aspek ekonomi dan sosial secara simultan, agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat (Todaro & Smith, 2020).

Selain itu, kualitas dan pemerataan pendidikan juga memiliki keterkaitan erat dengan tingkat kemiskinan, karena pendidikan berperan dalam meningkatkan produktivitas dan mobilitas sosial masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang memadai dapat memperluas peluang kerja dan meningkatkan pendapatan dalam jangka panjang. Sebaliknya, keterbatasan akses dan rendahnya kualitas pendidikan berpotensi memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi. Oleh karena itu, analisis perkembangan pendidikan menjadi penting dalam memahami dinamika kemiskinan secara lebih menyeluruh (Todaro & Smith, 2020). Adapun perkembangan tingkat pendidikan dan jumlah penduduk miskin di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 4 Tingkat Pendidikan dan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2019-2024

Sumber: *Badan Pusat Statistik Indonesia*, 2025

Berdasarkan Gambar 1.4 grafik di atas tingkat pendidikan yang diukur melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16-18 tahun pada periode 2019-

2024, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan mengalami perubahan yang berfluktuasi namun secara umum menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2019 APS tercatat sebesar 71,92%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 71,44% dan kembali menurun pada tahun 2021 menjadi 70,74%. Penurunan tersebut menunjukkan adanya dampak dari pandemi COVID-19 yang mengganggu proses pendidikan, seperti penerapan pembelajaran jarak jauh serta keterbatasan akses pendidikan bagi sebagian masyarakat. Setelah itu, pada periode 2022 hingga 2024 tingkat pendidikan kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 74,35% pada tahun 2024, yang menunjukkan adanya pemulihan di sektor pendidikan setelah masa pandemi.

Sementara itu, pada periode yang sama tingkat kemiskinan juga menunjukkan perubahan. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 27,54 juta jiwa dari 24,78 juta jiwa pada tahun 2019 akibat dampak krisis ekonomi selama pandemi. Namun pada tahun-tahun berikutnya jumlah penduduk miskin mulai menurun secara bertahap hingga mencapai 24,05 juta jiwa pada tahun 2024. Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pendidikan dapat berperan dalam menurunkan tingkat kemiskinan, karena pendidikan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keterampilan, serta peluang kerja sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya (Boari *et al.*, 2024).

Dalam konteks tersebut, penelitian yang secara simultan mengintegrasikan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pendapatan perkapita, dan tingkat pendidikan dalam satu kerangka analisis terhadap kemiskinan di

Indonesia masih relatif terbatas, khususnya dalam kajian ekonomi pembangunan. Padahal, UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, pendapatan perkapita mencerminkan kemampuan ekonomi rata-rata penduduk, serta tingkat pendidikan menentukan kualitas sumber daya manusia dan peluang memperoleh pekerjaan yang lebih layak (Juliansyah *et al*, 2024). Keterbatasan penelitian yang mengkaji ketiga variabel tersebut secara simultan menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara variabel ekonomi makro seperti pengangguran dan pendapatan terhadap kemiskinan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Yacoub (2012) yang menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dan penelitian yang dilakukan oleh Wulansari *et al.*, (2023) yang mengkaji pengaruh pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia.

Selain itu, sebagian besar penelitian masih berfokus pada variabel makro ekonomi dan wilayah tertentu, serta menggunakan metode regresi konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan memasukkan variabel UMKM, pendapatan perkapita, dan tingkat pendidikan, serta menggunakan pendekatan model ARDL untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang terhadap kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar studi masih menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan secara parsial, seperti UMKM,

pendapatan perkapita, maupun tingkat pendidikan yang dikaji secara terpisah. Selain itu, temuan empiris yang dihasilkan menunjukkan adanya ketidakkonsistenan (bersifat ambigu). khususnya terkait pengaruh UMKM dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan. Penelitian sebelumnya umumnya menggunakan pendekatan *Regresi Linier Konvensional* dan masih terbatas yang menerapkan metode *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL), yang memiliki keunggulan dalam menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang secara simultan. Di sisi lain, sebagian besar penelitian dilakukan pada lingkup wilayah yang terbatas dengan periode pengamatan yang relatif singkat. Oleh karena itu, masih terdapat kesenjangan penelitian.

Keterbaruan penelitian ini terletak pada penerapan model analisis yang mengintegrasikan variabel jumlah UMKM, pendapatan perkapita, dan tingkat pendidikan yang diproksikan melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS) dalam satu kerangka analisis terhadap kemiskinan di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif mengenai pengaruh jumlah UMKM, pendapatan perkapita, dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Selain memperkaya literatur ekonomi pembangunan, khususnya terkait peran sektor produktif dan kualitas sumber daya manusia dalam penanggulangan kemiskinan, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi perumusan kebijakan pembangunan yang lebih terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan (Todaro & Smith, 2020).

Berdasarkan pada fenomena kemiskinan yang terjadi di atas, maka penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kemiskinan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya agar dapat menanggulangi permasalahan kemiskinan yang tidak terkontrol, dalam hal ini peneliti akan mengkaji serta meneliti beberapa faktor kemiskinan yang berjudul **”Pengaruh Jumlah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), Pendapatan Perkapita, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pengaruh Jumlah UMKM terhadap kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan perkapita terhadap kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah di jelaskan di atas, maka dari itu tujuan yang ingin di capai dengan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Pengaruh jumlah UMKM terhadap kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

2. Mengetahui Pengaruh pendapatan perkapita terhadap kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Mengetahui Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi pembangunan terkait hubungan antara UMKM, pendapatan perkapita, tingkat pendidikan, dan kemiskinan.
2. Memberikan kontribusi akademis sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji variabel serupa.
3. Memperkuat teori-teori yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penulis akan meningkatkan wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang pengaruh antara UMKM, Pendapatan perkapita, dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini berguna sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk menurunkan angka kemiskinan melalui

peningkatan jumlah UMKM, peningkatan pendapatan perkapita, serta peningkatan kualitas pendidikan.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dan menambah wawasan bagi pihak-pihak terkait dan berkepentingan dengan masalah yang diteliti.